

Buletin

Bappebti

Mengabdikan Dengan Integritas



MENEGUHKAN KOMITMEN SEBAGAI REZIM ANTI PENCUCIAN UANG

SRG, PETANI SENANG
KITA PUN TENANG

PETANI BENAR BENAR
RASAKAN MANFAAT
SISTEM RESI GUDANG

E-REPORTING
LAPORAN KEUANGAN

EDISI **192**

Prosedur Penyelesaian Sengketa



Pendaftaran

Pemohon mendaftarkan permohonan Arbitrase kepada BAKTI.



Konfirmasi

Tuntutan akan diteruskan oleh BAKTI kepada pihak yang dituntut (Termohon), dan meminta jawaban terhadap tuntutan permohonan paling lambat 14 hari.



Penunjukan Arbiter

Pemohon & Termohon masing-masing mengusulkan satu Arbiter, kemudian kedua Arbiter terpilih bersama-sama menunjuk Arbiter ketiga sebagai ketua Majelis Arbitrase. Atau Para Pihak dapat menyepakati satu Arbiter tunggal.



Penyelenggaraan Sidang

Majelis Arbitrase/Arbiter Tunggal menyelenggarakan sidang pertama, Tuntutan akan dinyatakan gugur jika Pemohon tidak menghadiri sidang pertama, sedangkan jika Termohon tidak menghadiri dua kali persidangan, maka pemeriksaan dapat diajukan dan diputuskan tanpa kehadiran pemohon.

BAPPEBTI

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI



Sidang Pertama

Pada sidang pertama, Majelis Arbitrase/Arbiter Tunggal akan mengupayakan perdamaian antara Para Pihak. Apabila upaya perdamaian berhasil, Majelis Arbitrase/Arbiter Tunggal akan membuatkan akta perdamaian. Namun jika gagal, maka Arbitrase dilanjutkan.



Sidang Lanjutan

Arbitrase dilakukan secara tertutup dan menurut peraturan & acara Arbitrase BAKTI. Proses pemeriksaan lanjutan ini memakan waktu paling lama 180 hari sejak Majelis Arbitrase/Arbiter Tunggal terpilih. Batas waktu tersebut dapat diperpanjang jika dipandang perlu oleh Majelis dan disepakati oleh Para Pihak.



Hasil Putusan

Dalam waktu 30 hari setelah pemeriksaan selesai (Ditandai dengan penyerahan kesimpulan dari Para Pihak). Majelis Arbitrase/Arbiter Tunggal membacakan Putusan untuk segera dilaksanakan oleh Para Pihak. Selanjutnya BAKTI akan mendaftarkan Putusan tersebut pada Pengadilan Negeri dimana termohon berdomisili.

Arbiter yang dipilih
adalah orang
perseorangan yang
tercatat dalam Daftar
Arbiter BAKTI

BERITA UTAMA

Meneguhkan Komitmen Sebagai
Rezim Anti Pencucian Uang



DARI LAPANGAN

E-Reporting Laporan Keuangan



KIPRAH

Petani Benar-benar
Rasakan Manfaat Sistem
Resi Gudang



DAFTAR ISI

RESI GUDANG

Melahirkan Penguji Mutu Garam yang
Handal

10

PERDAGANGAN BERJANGKA

Sekali Lagi, Manfaat dan Cara Kenali
Penipuan Berkedok PBK

12

AGENDA FOTO

14

AKTUALITA

- Harga Kopi di Sumbar Naik
- Petani Bersemangat
- Pengamat Pertanian: Stok 700.000 Ton Beras
- Sudah Rasional
- Penguatan Yen Sentimen Penekanan Pasar Karet
- Resolusi Sawit Uni Eropa Hambat Kinerja Ekspor

16

ENGLISH CORNER

18

INFO HARGA

21

KOMIKITA

26



Buletin
Bappebti
Masyarakat Dengan Integritas

Penerbit
Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi

Penanggung Jawab
Bachrul Chairi

Redaktur
Nusa Eka

Penyunting / Editor
Subagiyo
Annisa F Wulandari
Apriliyanto

Fotografer
Gita Regina
Leli Wulandari

Sekretaris
Katimin

Alamat Redaksi
Gedung Bappebti
Jl. Kramat Raya
No. 172, Jakarta Pusat.

Redaksi menerima artikel ataupun
opini dikirim lengkap dengan
identitas serta foto ke E-mail :
humas.bappebti@kemendag.go.id

f Bappebti Kementerian Perdagangan
@InfoBappebti
@Bappebti

www.bappebti.go.id



MENEGUHKAN KOMITMEN SEBAGAI REZIM ANTI PENCUCIAN UANG

Sejak tahun 1999 Indonesia aktif mengikuti kegiatan Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) bersama 41 negara di kawasan Asia Pasifik. Ini dilakukan karena pemerintah memiliki komitmen yang tinggi untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT)

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) telah menjadi musuh dunia. Ia disejajarkan dan memang tidak jarang berkelindan dengan kejahatan pendanaan bagi terorisme. Berbagai negara dalam beberapa dekade terakhir berupaya menjalin kerjasama untuk memerangi kedua jenis kejahatan itu. Tak heran, karena dampak kedua jenis kejahatan ini luar biasa. Bukan hanya bisa mengguncang perekonomian suatu negara dan bahkan perekonomian internasional, merongrong kedaulatan negara dan mengganggu stabilitas politik dunia, tapi juga karena modusnya

cukup rumit sehingga tidak mudah dilacak jejaknya. Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme menuntut langkah-langkah strategis, terintegrasi, dan terlembaga sebagai sebuah sistem.

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen tinggi untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT). Sejak tahun 1999 Indonesia aktif mengikuti kegiatan Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) bersama 41 negara di kawasan Asia Pasifik.

BAPPEBTI TELAH MENYIAPKAN DIRI MENYAMBUT PELAKSANAAN MUTUAL EVALUATION REVIEW (MER) SEBAGAI SYARAT AGAR INDONESIA BISA DITERIMA MENJADI ANGGOTA FATF



Melalui Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 Indonesia mengukuhkan diri masuk sebagai anggota APG. APG adalah salah satu badan regional dari Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) yaitu organisasi antar-pemerintah yang bertujuan mempromosikan kebijakan nasional dan internasional guna memerangi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. FATF yang memiliki banyak pakar di bidang hukum dan keuangan, mengeluarkan rekomendasi bagi para anggotanya untuk menyusun peraturan-peraturan standar untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Meskipun sudah menjadi anggota APG, Indonesia masih belum bisa bergabung dengan FATF. Di antara negara-negara anggota G-20 Indonesia adalah satu-satunya negara yang belum menjadi anggota FATF. Indonesia bahkan pernah dimasukkan dalam kelompok negara-negara berisiko tinggi terhadap tindak pidana pencucian uang. Hal ini menjadi hambatan bagi kegiatan-kegiatan bisnis dan investasi internasional karena kredibilitas Indonesia masih belum diakui. Upaya perbaikan-perbaikan

regulasi yang dilakukan pemerintah membuat penilaian terhadap Indonesia membaik, sehingga pada tahun 2015 Indonesia dikeluarkan dari daftar negara yang berisiko tinggi terhadap TPPU dan TPPT. Namun, hingga kini pemerintah masih harus berupaya keras untuk bisa diterima sebagai anggota FATF.

Untuk bisa masuk FATF Indonesia harus menjalankan 40 rekomendasi dari organisasi internasional yang berpusat di Paris, Perancis itu. Ke-40 rekomendasi itu terkait upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Sejauh mana Indonesia mampu memenuhi rekomendasi-rekomendasi tersebut akan dinilai melalui kegiatan *Mutual Evaluation Review* (MER) yang akan dilakukan oleh APG selaku representasi FATF di tingkat regional. Hasil MER ini yang akan menentukan apakah Indonesia akan diterima atau masih harus melakukan perbaikan-perbaikan untuk menjadi anggota FATF. Jadi, MER yang dijadwalkan dilakukan pada tahun 2017 ini merupakan momen sangat penting. Itu sebabnya, pemerintah dari jauh-jauh hari melakukan persiapan-

persiapan dengan berupaya semaksimal mungkin memenuhi rekomendasi-rekomendasi FATF.

Persiapan menghadapi MER melibatkan berbagai kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yang dibentuk berdasar Perpres Nomor 6 Tahun 2012 dan diubah dengan Perpres Nomor 117 Tahun 2016. Penanganan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme memang menuntut keikutsertaan berbagai pihak lintas departemen dan sektor. Hal ini mengingat kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme bersifat sangat kompleks, bisa menyusup ke beragam bidang usaha seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, perdagangan berjangka komoditi, *property* dll. Lembaga-lembaga pemerintahan, khususnya yang berfungsi sebagai lembaga pengatur dan pengawas (LPP) kegiatan usaha-usaha tersebut seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi



**ORANG YANG DINIAI MEMILIKI RISIKO
TINGGI TERKAIT TPPU/TPPT ADALAH
ORANG YANG POPULER SECARA POLITIS.
SEDANGKAN BIDANG USAHA YANG
MEMILIKI RISIKO TINGGI TERHADAP
KEMUNGKINAN DIGUNAKAN TPPU/TPPT
YAITU PERBANKAN, PASAR MODAL,
AGEN PROPERTI, DAN PEDAGANG
KENDARAAN BERMOTOR**

[Bappebti] dituntut komitmennya mendukung rezim Anti Pencucian Uang [APU] dan Pencegahan Pendanaan Terorisme [PPT], dengan menerbitkan regulasi atau aturan-aturan sesuai yang direkomendasikan FATF.

Peran Bappebti

Kepala Bappebti Bachrul Chairi dalam suatu kesempatan kepada media mengungkapkan, bahwa Bappebti sangat mendukung komitmen pemerintah untuk memerangi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. “Bappebti juga telah menyiapkan diri menyambut pelaksanaan *mutual evaluation review* sebagai syarat agar Indonesia bisa diterima menjadi anggota FATF,” ungkap Bachrul. Sehubungan dengan hal itu, kata Bachrul, Bappebti telah menyelesaikan penyusunan sejumlah dokumen berupa peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pencegahan TPPU dan TPPT dalam lingkup perdagangan berjangka komoditi.

Beberapa peraturan tersebut yakni Peraturan Kepala Bappebti Nomor 4 Tahun 2017 tentang “Pedoman

Pelaksanaan Pemblokiran Serta Merta Oleh Pialang Berjangka atas Dana yang Dimiliki dan dikuasai oleh Orang atau Korporasi Berdasarkan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris”. Peraturan ini selanjutnya diubah dengan Peraturan Kepala Bappebti No. 10 Tahun 2017 tentang “Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Secara Serta Merta oleh Pialang Berjangka atas Dana yang Dimiliki dan dikuasai oleh Orang atau Korporasi yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal”. Perubahan ini dilakukan untuk memenuhi rekomendasi FATF.

Peraturan ini mewajibkan pialang berjangka melakukan pemblokiran serta merta [*freezing without delay*] atas dana yang dimiliki atau dikuasi, baik secara langsung atau tidak langsung, oleh orang atau korporasi berdasar Daftar Terduga Teroris atau Organisasi Teroris [DTTOT] yang dikeluarkan oleh Kapolri berdasar penetapan pengadilan. Pemblokiran juga dilakukan atas dana yang dimiliki atau dikuasi, baik secara langsung atau tidak langsung, oleh orang atau korporasi yang masuk dalam

Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Selanjutnya, ada Peraturan Kepala Bappebti Nomor 8 Tahun 2017 tentang “Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pialang Berjangka”. Peraturan ini merupakan perubahan terhadap Peraturan Kepala Bappebti Nomor 2 Tahun 2016 tentang “Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Pialang Berjangka”. Peraturan ini pada intinya mewajibkan pialang berjangka untuk mengenali nasabah dan melakukan analisis risiko terkait identitas dan asal nasabah dalam hubungannya dengan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan, Bappebti, Sri Hariyati, dalam salah satu paparannya tentang “Implikasi Ketentuan APU/PPT dalam Perdagangan Berjangka Komoditi” [2017] menjelaskan, pialang berjangka wajib melakukan identifikasi dan verifikasi [calon] nasabah. Hal ini dimaksudkan bukan hanya untuk sekadar mengetahui profil nasabah. Lebih dari itu, berdasar identifikasi



dan verifikasi data nasabah pialang berjangka bisa memetakan tingkat risiko nasabah dalam hubungannya dengan TPPU/TPPT. Untuk itu pialang berjangka harus melakukan pendekatan berbasis risiko [*risk based approach*] terhadap nasabah. Dengan pendekatan ini pialang berjangka bisa memastikan calon nasabah atau nasabah tersebut termasuk orang atau pihak yang mempunyai risiko tinggi, menengah, atau rendah terkait kemungkinannya melakukan TPPU/TPPT. Demikian pula usaha yang dilakukan nasabah, apakah termasuk usaha dengan risiko tinggi, menengah, atau rendah terhadap kemungkinan digunakan untuk melakukan kejahatan pencucian uang dan atau pendanaan terorisme. Apakah nasabah tersebut berasal dari daerah atau negara dengan risiko tinggi, menengah, atau rendah terkait TPPU/TPPT.

“Orang yang diniai memiliki risiko tinggi terkait TPPU/TPPT adalah orang yang populer secara politis [*politically exposed person*] yaitu orang, WNI/WNA yang menjalankan kewenangan publik sebagai pejabat penyelenggara negara

yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, pejabat lain berkaitan dengan penyelenggaraan BUMN, dan/atau tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh,” ungkap Sri Hariyati dalam paparannya. Sedangkan bidang usaha yang memiliki risiko tinggi terhadap kemungkinan digunakan untuk melakukan TPPU/TPPT yaitu perbankan, pasar modal, dan perusahaan atau agen properti, serta pedagang kendaraan bermotor. Nasabah yang memiliki profil dan bidang usaha berisiko tinggi terkait TPPU/TPPT perlu mendapat perhatian atau pengawasan cukup ketat.

Nah, selain beberapa peraturan tersebut di atas masih ada beberapa peraturan yang dimaksudkan untuk mendukung rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Yakni Peraturan Kepala Bappebti Nomor 9 Tahun 2017 tentang “Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kepatuhan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan terorisme pada Pialang Berjangka”. Satu lagi yaitu

Peraturan Kepala Bappebti Nomor 11 tentang “Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pialang Berjangka”.

Dalam kegiatan *mutual evaluation review* oleh APG, peraturan-peraturan tersebut dikategorikan sebagai aspek-aspek teknis [*technical compliance*], bagian dari 40 rekomendasi FATF yang harus dipenuhi. Kepala Sub Bagian Perumusan Peraturan Perundang-undangan, Bappebti, Yovian Andri Prihandono, menjelaskan, selain pemenuhan aspek-aspek teknis kegiatan *mutual evaluation review* juga menilai efektivitas pelaksanaan aturan-aturan teknis tersebut [*immediate outcomes*]. “Penilaian terhadap *technical compliance* sudah dilakukan bulan September 2017 lalu,” ungkap Yovian.

Selanjutnya dalam kunjungan langsung ke Indonesia bulan November 2017 tim penilai dari APG mengaji efektivitas penerapan peraturan-peraturan terkait pencegahan dan penindakan TPPU/TPPT. Penilaian terhadap *immediate outcomes* mencakup 11 komponen penilaian antara lain sejauh mana risiko kemungkinan adanya TPPU/TPPT dipahami, apakah pengawasan atau supervisi pelaksanaan aturan-aturan terkait TPPU/TPPT telah dilakukan dengan baik, apakah informasi terkait kecurigaan adanya TPPU/TPPT ditindak-lanjuti dan diinvestigasi.

Yovian lebih jauh menjelaskan, untuk menjamin efektivitas pelaksanaan aturan-aturan terkait TPPU/TPPT Bappebti terus melakukan sosialisasi berbagai peraturan tersebut kepada para pemangku kepentingan di berbagai daerah di Indonesia. Menyangkut pemahaman dan pelaksanaan aturan-aturan tersebut di kalangan pialang berjangka, Yovian mengatakan, sejauh ini masih sangat beragam. Ada yang sudah paham dan menjalankan aturan-aturan dengan baik, tapi ada juga yang belum melaksanakan dengan baik.

“Untuk menilai tingkat pemahaman

mereka, Bappebti menyebarkan kuesioner. Juga ada pertemuan-pertemuan teknis. Kemaren [selama tahun 2017] ada empat kali pertemuan teknis terkait implementasi aturan-aturan itu,” jelas Yovian.

Tentang kasus tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, menurut Yovian, sejauh ini belum pernah ditemukan di lingkungan perdagangan berjangka komoditi. Menurut *National Risk Assessment* [NRA] 2015 yang disusun PPAK, perdagangan berjangka komoditi tidak termasuk

area yang masuk berisiko tinggi. PJK [pengguna jasa keuangan] yang berisiko tinggi yaitu perbankan, pasar modal, agen *property*, dan pedagang kendaraan bermotor. Sedangkan yang termasuk berisiko menengah antara lain perusahaan pembiayaan dan perusahaan valas. Perusahaan perdagangan berjangka komoditi tergolong berisiko rendah.

Meskipun termasuk berisiko rendah, pengaturan dan penerapan aturan-aturan untuk pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPPT di

lingkungan perdagangan berjangka komoditi tetap harus dilakukan dengan baik. Seperti pernah disampaikan Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan, Bappebti, Sri Hariyati, pengaturan dan penerapan aturan terkait TPPU/TPPT harus merata di semua sektor. “Harus equal, jangan sampai ada yang bolong di salah satu sektor,” ungkap Sri.

Bappebti, sejauh ini, sudah menunjukkan komitmennya untuk mendukung rezim Anti Pencucian Uang/ Pencegahan Pendanaan Terorisme.

National Risk Assessment (NRA) Indonesia Tahun 2015

JENIS PJK	LEVEL RISIKO	KATEGORI RISIKO
Perbankan	55,9	Tinggi
Pasar Modal	54,1	Tinggi
Perusahaan/Agen Properti	53,5	Tinggi
Pedagang Kendaraan bermotor	45,0	Tinggi
Perusahaan Pembiayaan	44,1	Menengah
Pedagang Valas	43,8	Menengah
Pedagang Logam Mulia	42,6	Menengah
Kegiatan Usaha Pengiriman Uang-KUPU	39,7	Menengah
Pedagang Barang Seni/Antik	38,8	Menengah
Balai Lelang	36,1	Menengah
Asuransi	33,4	Menengah
Dana Pensiun	9,0	Rendah

Berdasarkan NRA yang dilakukan pada tahun 2015, didapatkan bahwa Perbankan dan Pasar Modal merupakan PJK yang memiliki risiko tinggi serta Perusahaan Pembiayaan memiliki kategori risiko menengah dalam tindak pidana pencucian uang.

Mekanisme Penyampaian Daftar Terduga Teroris/Organisasi Teroris (DTTOT)



Menyampaikan DTTOT yang telah ditetapkan Pengadilan Jakarta Pusat ke Bappebti yang disertai dengan permintaan pemblokiran serta merta

Perintah pemblokiran, pembukaan blokir, dan /atau perpanjangan pemblokiran



Menerima DTTOT dan menyampaikan daftar tersebut kepada PIALANG BERJANGKA



Wajib melakukan pemblokiran serta merta atas Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau Korporasi berdasarkan DTTOT yang telah dikeluarkan oleh Kapolri berdasarkan penetapan PN Jakarta Pusat

MELAHIRKAN PENGUJI MUTU GARAM YANG HANDAL

Selama 10 hari pengelola koperasi dari berbagai daerah dilatih untuk menjadi penguji mutu garam yang handal. Kompetensi mereka sangat diperlukan untuk pelaksanaan SRG garam.

Garam merupakan bahan yang sangat vital dalam kehidupan sehari-hari. Komoditi strategis ini juga termasuk dalam sistem resi gudang (SRG), karena seperti halnya beras, gabah dan yang lainnya harganya cenderung fluktuatif pada saat-saat panen raya berlangsung. Untuk meningkatkan mutu garam yang dikelola dalam SRG, Bappebti menyelenggarakan pelatihan calon penguji mutu garam. Selama 10 hari mulai 13-22 November 2017. "Pelatihan Calon Penguji Mutu Komoditas SRG ini terselenggara berkat kerjasama antara Bappebti dengan Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu

Kementerian Perdagangan, serta Direktorat Jasa Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan," kata Kepala Bappebti, Bachrul Chairi, dalam sambutan tertulis yang disampaikan oleh Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan SRG dan Pasar Lelang Komoditas, Retno Rukmawati.

Kepala Bappebti menjelaskan sebagai suatu sistem, pelaksanaan Sistem Resi Gudang memerlukan peran aktif dari berbagai pihak/kelembagaan yang terkait. SRG tidak hanya mencakup penyimpanan komoditas tetapi juga pengujian mutu komoditas, pemeliharaan komoditas serta pemasaran. Oleh karena itu, SRG tidak hanya melibatkan Pengelola Gudang, tetapi juga Pusat Registrasi dan Lembaga Penilaian Kesesuaian, antara lain Uji Mutu Komoditas. "Namun demikian, berdasarkan hasil evaluasi kami di lapangan, keberadaan Lembaga Uji Mutu Komoditas masih sangat terbatas khususnya di daerah sentra produksi yang menjadi target dalam pelaksanaan SRG sehingga menjadikan implementasi SRG tidak berjalan seperti yang diharapkan," ujar Bachrul.

Bimbingan Teknis Calon LPK Uji Mutu

Garam dalam SRG ini dilaksanakan dalam 3 tahapan yaitu Bimbingan Teknis Petugas Pengambil Contoh Garam, Bimbingan Teknis Pengujian Garam, dan Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Sistem Mutu SNI ISO 17205. Pelaksanaannya dilaksanakan di Hotel Grand Cemara Jakarta, Gudang SRG Garam Nasional Kabupaten Indramayu-Jawa Barat dan Laboratorium Pengujian Mutu Barang Ciracas di Jakarta Timur.

Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman dan kemampuan teknis terkait pengujian mutu garam dalam SRG kepada Calon LPK di daerah. Setelah mengikuti Bimbingan Teknis tersebut, peserta diharapkan dapat memiliki kompetensi pengujian mutu Garam dan berhak memperoleh rekomendasi dari Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan yang selanjutnya dapat mengajukan diri sebagai LPK uji mutu Garam dalam SRG. Dengan adanya LPK Uji Mutu Garam di sekitar gudang garam nasional diharapkan pelaksanaan SRG untuk Komoditi Garam menjadi semakin efektif dan efisien.

Koperasi yang mendapat hibah pembangunan gudang garam dari Kementerian Kelautan:



1. Koperasi Garam Rakyat Muara Djati Kabupaten Cirebon;
2. KSU Mina Garam Rejeki Agung Kabupaten Indramayu;
3. Koperasi Mutiara Laut Mandiri Kabupaten Pati;
4. KUD Karya Sakti Kabupaten Pamekasan;
5. Koperasi Nusa Larity Jaya Kabupaten Bima;
6. Koperasi Mappatuwo Kabupaten Pangkajene Kepulauan;
7. Koperasi Garam Mutiara Bahari Kabupaten Brebes;
8. Koperasi Guyup Rukun Kabupaten Rembang;
9. Koperasi Garam Laut Kabupaten Demak;
10. Koperasi Ronggolawe Makmur Kabupaten Tuban;
11. Koperasi Syirkah Mu'awannah Kabupaten Sampang;
12. Koperasi Mitra Usaha Bipolo Kabupaten Kupang.

Pelatihan ini diikuti oleh 19 peserta mewakili koperasi daerahnya masing-masing. Berikut komentar beberapa peserta dan instruktur yang memberi pengajaran.



Nurul Fadhlina
Instruktur dari Balai Pengujian
Mutu Barang Kemendag



Manggala Yani Saputra
Koperasi Pugar Ronggolawe
Makmur, Tuban, Jawa Timur



Tety Indriyati
Koperasi Mina Garam Rejeki Agung
Indramayu

Untuk memperoleh garam yang berkualitas, garam harus diuji mutu terlebih dahulu. Untuk itulah para peserta diajarkan dan dilatih bagaimana mereka bisa melakukan uji mutu garam yang diterima oleh koperasi. Nantinya setiap koperasi akan mendapat bantuan peralatan untuk membuat laboratorium mini. Alat itu bantuan dari KKP. Dengan begitu tenaga yang sudah terlatih ini bisa melakukan pengujian di gudang, sehingga saat itu juga bisa langsung diketahui apakah garam yang disetorkan ke koperasi memenuhi persyaratan atau tidak. Selama ini Sebelumnya pengujian dilakukan di lab yang letaknya jauh dari gudang, bisa makan waktu 3-6 jam baru bisa diketahui kualitas garamnya. Ini terobosan untuk meningkatkan efisiensi pengujian mutu garam di gudang milik koperasi.

Mutu garam itu ada yang tergolong KP1 [kualitas terbaik], KP2 dan KP3. Di Tuban rata-rata sudah KP-1 dengan kandungan NaCl-nya 93 persen. Sementara KP2 88-90 persen dan KP3 82-88 persen. Saat pelatihan ini berlangsung gudang koperasi kami baru 80 persen rampung. Nantinya, jika siap gudang SRG itu kami akan laksanakan pengujian mutu yang diajarkan disini.

Soal pengujian mutu, selama ini pengujian dilakukan secara visual, kita lihat dan periksa secara kasat mata saja, serta ditanya darimana asal tambaknya. Apakah tambaknya pakai geosolator atau tidak, karena yang pakai geosolator dipastikan garamnya bersih karena tambaknya dilapisi pakai terpal sehingga masuk kategori KP1 [kualitas 1]. Panen garam terjadi pada saat musim kemarau. Setiap kali panen biasanya memakan waktu 10-12 hari per sekali panen, sehingga produksi garam setahun sekitar 8 ton x 78 = 700 ton. Kalau pada musim hujan tambaknya digunakan untuk ternak ikan bandeng. Koperasi Pugar Ronggolawe Makmur sendiri baru berdiri 2 tahun, sejak tahun 2015. Anggotanya ada 22 orang petani garam dengan luas area tambak garam sekitar 18 hektar.

Di Indramayu sudah ada Gudang SRG sejak satu tahun lalu. Gudang menampung garam yang diproduksi oleh 70 anggota koperasi. Produksi garam selama musim panen Juli-Oktober sekitar 3.000 ton.

Selama ini garam kami digunakan untuk kebutuhan industri. Pengujian mutu dilakukan secara visual dan dibandingkan dengan standar sample garam yang sudah ada untuk menentukan grade-nya.

Di Indramayu, selain tambak milik petani, koperasi juga memiliki lahan tambak sendiri. Dari segi pemasaran, masalah terjadi pada saat musim panen dimana harga anjlok. Harga garam yang biasanya Rp2.000-Rp4.000 bisa anjlok sampai Rp400 per kilo. Pelatihan ini sangat membantu sekali, dan dengan adanya SRG petani bisa lakukan tunda jual. Indramayu akan dijadikan contoh gudang garam yang dikelola oleh koperasi, selain Pamekasan [Jawa Timur] dan Pati [Jawa Tengah].



Sekali Lagi, Manfaat dan Cara Kenali Penipuan Berkedok PBK

Penting bagi perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Karena orang sering menganggap PBK sebagai produk yang relatif 'masih baru', maka memang perlu terus diinformasikan secara terus-menerus.

Berdasarkan Undang-Undang No 32/1997 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No 10/2011, tentang Perdagangan Berjangka Komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditas dengan penarikan margin dengan penyelesaian kemudian berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya. Perdagangan berjangka dilakukan di Bursa Berjangka, yang memperdagangkan Kontrak Berjangka sebagai komoditi. Kontrak berjangka sendiri merupakan kontrak yang standar, dan waktu penyerahannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Karena bentuk kontrak yang standar, maka yang dilakukan negosiasi hanya harganya saja. Terpenuhi kontrak berjangka sesuai dengan spesifikasi yang

tercantum dalam kontrak, dan dijamin oleh suatu lembaga khusus yaitu Lembaga Kliring Berjangka. Terdapat 2 manfaat utama dari perdagangan berjangka komoditi, yaitu:

1. Sebagai sarana pengelolaan risiko (risk management)

Sarana pengelolaan risiko pada perdagangan berjangka komoditi bisa tercapai melalui kegiatan lindung-nilai atau hedging. Harga komoditas primer yang bersifat fluktuatif bergantung pada faktor yang sulit dikendalikan seperti musim atau bencana alam membuat risiko terjadinya gejolak harga meningkat.

Dengan kegiatan lindung-nilai menggunakan Kontrak Berjangka, pelaku usaha dapat mengurangi sekecil mungkin dampak yang diakibatkan

oleh gejolak harga tersebut. Kontrak berjangka bisa berperan untuk "mengunci" harga komoditas yang baru akan dipanen beberapa bulan kemudian. Hal ini berarti jaminan harga sudah pasti, sehingga saat panen harga jual tidak akan terpengaruh oleh kenaikan atau penurunan harga jual di pasar tunai.

2. Sarana pembentukan harga (price discovery)

Fungsi kontrak berjangka sebagai sarana pembentukan harga maksudnya adalah agar terbentuk harga yang transparan dan wajar. Hal ini mungkin terjadi karena transaksi hanya dilakukan melalui dan oleh anggota bursa. Kondisi tersebut berarti antara pembeli dan penjual kontrak berjangka tidak saling kenal atau mengetahui secara langsung. Adapun harga yang terbentuk di bursa ini umumnya dijadikan harga acuan oleh dunia usaha, termasuk petani dan produsen untuk melakukan transaksi di pasar fisik.

Mengingat maraknya penipuan berkedok investasi sejenis, masyarakat perlu lebih jeli dalam mengidentifikasi perusahaan bodong. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah, sebelum memutuskan untuk berinvestasi, sebaiknya dilakukan pengecekan terlebih dahulu mengenai izin usaha perusahaan.

Untuk perdagangan berjangka komoditi, pengecekan bisa dilakukan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang berada di bawah Kementerian Perdagangan (Kemendag) Republik Indonesia. Selain itu, perlu diperhatikan pula bahwa berlaku prinsip *high risk high return* dalam bisnis. Maksudnya, ketika investasi yang memiliki risiko lebih besar akan memberikan keuntungan yang lebih besar.

Hal yang sama berlaku yaitu *low risk low return*, sehingga ketika ada penawaran investasi yang terlihat memiliki risiko yang kecil dengan

keuntungan maksimal, masyarakat harus waspada dan melihat apakah hal tersebut logis atau tidak.

Potensi PBK dan Kerja Keras

Selama kurun waktu 2016-2017, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah menutup 81 situs/website perdagangan berjangka. Karena melanggar aturan. Bappebti bersama OJK, Kepolisian, Kejaksaan, Kemenkeu, Kemenkominfo, BI, PPATK berkoordinasi dengan membentuk satgas. Untuk menjangkit investasi bodong maupun memblokir situs internet pialang ilegal dan pialang lokal yang telah dicabut izinnya.

Keputusan ini diambil Bappebti karena perusahaan itu tidak terdaftar dan melanggar ketentuan bursa berjangka. Ini membuktikan maraknya penipuan berkedok investasi PBK serta tingginya transaksi ilegal di Indonesia. Sekaligus memperlihatkan masih banyaknya masyarakat yang belum mengenal dengan baik PBK. Ini sebuah kondisi riil yang menjadi dilema sekaligus tantangan bagi penyelenggara bisnis investasi PBK. Derasnya arus informasi di era globalisasi seperti ini sudah tak terbendung. Untung kalau informasi itu benar dan legal, sebaliknya jika abal-abal alias bodong alias ilegal, maka bagi masyarakat awam, baru diketahui setelah mereka menjadi korban.

Perusahaan penyelenggara investasi PBK di Tanah Air pun harus kerja ekstra. Sementara peluang memang masih sangat terbuka luas, mengingat pada dasarnya karakter masyarakat Indonesia memang menyukai bentuk usaha seperti ini, berbisnis investasi dengan model terkini, yakni PBK. Potensi yang ada di industri ini sangat besar dan dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia. Namun, lagi-lagi perlu mengkaji-ulang, apa yang salah dalam hal ini? Hingga dalam rentang waktu yang cukup lama terasa singkat

untuk mensinkronkan kondisi riil di masyarakat yang ternyata masih awam dengan jenis investasi ini.

Perlu ditelusuri lagi mengapa masyarakat hanya kenal dengan saham, obligasi, reksadana, deposito dan sebagainya. Sebaliknya, investasi PBK sepertinya baru terdengar di telinga mereka pada beberapa tahun terakhir ini. Satu lagi yang menjadi catatan penting bahwa citra negatif yang melekat di kalangan pelaku perusahaan pialang harus segera dipulihkan sebelum menjadi virus yang bisa mengerogoti kondisi sehat investasi PBK ini.

Edukasi dan sosialisasi dengan melibatkan banyak pihak termasuk media massa. Ini salah satu upaya yang tepat, meski bisa jadi belum maksimal. Para perusahaan penyelenggara PBK bersama Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan Kliring Berjangka Indonesia (KBI) terus menyelenggarakan edukasi dan sosialisasi di Pekanbaru, Semarang, Medan, Palembang dan Surabaya mulai Agustus hingga November 2017.

Perlu kerja ekstra keras untuk mendapatkan hasil maksimal. Bila perlu seluruh provinsi di Tanah Air ini sudah tersentuh edukasi dan sosialisasi ini agar bisnis ini menyebar dan diterima masyarakat di seluruh antero Indonesia.

Bappebti-Disperindag Yogya Gelar Literasi PBK



Bappebti dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi [Disperindag] Daerah Istimewa Yogyakarta [DIY] menggelar Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi di Yogyakarta, Kamis [2/11]. Hadir di acara Sekretaris Bappebti, Karo Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti, Karo Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik Bappebti, Kadisperindag DIY, Analis PPAK, perwakilan dari PT BBJ, PT KBI, PT ICH dan PT ICDX. Sekretaris Bappebti, Nusa Eka mewakili Kepala Bappebti Kemendag memberikan arahan sekaligus membuka acara ini.

Optimalisasi Peran Direktur Kepatuhan Industri PBK



Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi [Bappebti] Kementerian Perdagangan, Bachrul Chairi di Medan, Sumatera Utara, Kamis [16/11], resmi membuka Forum Konsultasi Teknis Pelaku Usaha "Optimalisasi Peran Direktur Kepatuhan [DK] dalam Industri Perdagangan Berjangka Komoditi [PBK]. FKT ini diikuti 80 peserta yang terdiri dari Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka aktif, perwakilan bursa berjangka, lembaga kliring berjangka, dan asosiasi perdagangan berjangka komoditi Indonesia.

Mendag Menerima Kunjungan Eksportir Karet

Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, menerima kunjungan Eksportir Karet di Kantor Kementerian Perdagangan, Kamis [23/11]. Dalam kesempatan itu, Mendag didampingi Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Bachrul Chairi; Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, Kasan; Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Dharmayugo Hermansyah serta Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Tuti Prahastuti.



Penggudangan Perdana SRG Lada Syariah Babel



Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi [Bappebti] Kementerian Perdagangan [Kemendag] bersama Pemerintah Provinsi Bangka Belitung [Babel] meresmikan Penggudangan Perdana Sistem Resi Gudang [SRG] Syariah untuk Komoditas Lada. Kegiatan ini dilakukan di Desa Puding Besar, Babel, Rabu [22/11]. Peresmian dilakukan Wakil Gubernur Bangka Belitung, Abdul Fatah bersama Kepala Bappebti, Bachrul Chairi; Anggota DPRD Babel; Kadis Perindag Bangka; Dirut ICDX, Lamon Rutten; Direktur Operasional BGR, Taufik Hidayat.



Harga Kopi di Sumbang Naik Petani Bersemangat

2018 kami menargetkan akan membeli kopi dari petani sebanyak 25 sampai 30 ton,” ujar Firman, Jumat [24/11].

Di koperasi ini juga diproduksi beberapa kopi yang diberi nama Solok Radjo dengan harga jual Rp90.000 per kilogram, Kerinci Radjo Rp90.000, dan Labah Rimbo Rp100.000. Saat ini, terkait perkembangan komoditi kopi ia menilai pasarnya sudah ada sesuai dengan kualitas barang.

Sementara Wakil Gubernur Sumbang, Nasrul Abit, mengatakan berdasarkan data dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan produksi kopi di Sumbang mencapai 15.670 ton per tahun serta sudah banyak diekspor ke luar negeri. “Luas area perkebunan kopi mencapai 20.754 hektare,” katanya.

Daerah penghasil kopi Arabika atau perkebunan kopi di atas 1.000 meter di atas permukaan laut, yakni Kabupaten Solok, Agam, Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Limapuluh Kota, dan Pasaman Barat. Masing-masing daerah itu memiliki cita rasa yang berbeda. Misalnya sama-sama kopi Arabika, namun rasa dan aroma setiap daerah memiliki khas masing masing.



mengatasinya. Namun, Husein juga berpendapat jika hal tersebut seharusnya bisa teratasi bila pemerintah sudah menerapkan HET dan mengerahkan Satgas Pangan.

Husein berpendapat, bila di tahun mendatang Bulog ditugaskan kembali menyerap gabah/beras dalam jumlah yang besar, maka Bulog akan mengalami kerugian “Kalau tahun depan Bulog menyerap di atas 3 juta ton, untuk apa? sebagai Perum, itu akan merugikan,” jelasnya.

Husein menyarankan akan lebih baik bila cadangan beras pemerintah diperbesar. Cadangan beras ini dapat digunakan untuk menjaga harga, diperuntukkan sebagai keperluan gawat darurat, serta untuk bantuan internasional. “Kalau cadangan tidak diperbesar, saluran tidak ada, nah itu yang menjadi persoalan,” tukasnya.

Pengamat Pertanian: Stok 700.000 Ton Beras Sudah Rasional

STOK akhir beras yang dimiliki Perum Bulog diperkirakan sebesar 700.000 ton. Pengamat pertanian, Husein Sawit, mengatakan jumlah stok akhir Bulog ini sudah rasional, mengingat program bantuan beras bagi warga miskin (raskin) akan dihapus pada tahun 2018 mendatang. Dengan penghapusan program raskin ini, maka penyaluran beras oleh Bulog akan berkurang. “Tahun depan kan penyaluran akan nol, yang ada tinggal cadangan beras pemerintah. Cadangan beras pemerintah kan untuk intervensi pasar itu hanya 300.000 ton,” ujar Husein, Senin [27/11].

Husein menyebutkan stok awal dengan jumlah kecil akan menguntungkan sebuah perusahaan. Namun, hal itu akan sedikit mengganggu pemerintah di mana apabila stok beras kecil, saat terjadi ketidakstabilan harga, maka pemerintah tidak akan memiliki senjata untuk

Penguatan Yen Sentimen Penekan Pasar Karet

Pada Senin [27/11], reli harga karet berakhir dengan ditutup di zona merah sejalan dengan pelemahan harga minyak mentah. Harga karet untuk pengiriman April 2018, kontrak teraktif di Tokyo Commodity Exchange (Tocom), ditutup melemah 0,77% atau 1,50 poin ke level 194,20 yen per kilogram (kg).

Pergerakan harga karet sebelumnya dibuka stagnan di posisi 195,70, setelah pada perdagangan Jumat [24/11] ditutup melesat 2,30% atau 4,40 poin di level 195,70. Kazuhiko Saito, analis dari broker komoditas Fujitomi, mengatakan penguatan yen dan pelemahan harga minyak mentah menjadi sentimen penekan terhadap pasar karet. “Namun, tingkat pelemahan dibatasi oleh persediaan karet di Shanghai, China, yang menurun tajam,” jelas Saito, seperti dikutip dari *Bloomberg*.

Jumlah persediaan karet China yang dimonitor Shanghai Futures Exchange dilaporkan merosot 37% ke 322,408 ton pekan lalu, turun



dari level tertingginya sejak setidaknya 2003.

Sementara harga minyak West Texas Intermediate (WTI) kontrak Januari 2018 melemah 0,47% atau 0,28 poin ke US\$58,67 per barel pada pukul 13.40 WIB, setelah dibuka stagnan pada level US\$58,95. Pada saat yang sama, minyak Brent pengiriman Januari 2018 turun 0,04 poin ke level 63,82 per barel.

Ikut membebani karet, nilai tukar yen terpantau menguat 0,11% atau 0,12 poin ke posisi 111,41 per dolar AS pada pukul 13.49 WIB, setelah pada Jumat [24/11] berakhir melemah 0,29% di posisi 111,53. Apresiasi nilai tukar yen Jepang terhadap dolar AS membuat harga komoditas yang diperdagangkan dalam mata uang ini menjadi relatif lebih mahal bagi para pembeli luar negeri. Dampaknya, permintaan akan komoditas ini berpotensi menurun.



Resolusi Sawit Uni Eropa Hambat Kinerja Ekspor

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menilai hambatan perdagangan non teknis seperti resolusi sawit Uni Eropa dapat menghambat kinerja ekspor komoditas tersebut, dan eksportir biasanya akan memilih negara tujuan ekspor lain. “Kami mengkhawatirkan tuduhan atau hambatan non teknis tersebut bakal diikuti oleh negara lain. Hal serupa telah terjadi di Australia yang meniru langkah yang diterapkan Amerika Serikat,” kata Direktur Pengamanan Perdagangan Kemendag, Pradnyawati kepada pers di Jakarta, Jumat [17/11].

Sementara Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, mengatakan pihaknya akan menyerang balik negara yang menjalankan kampanye negatif untuk komoditas ekspor unggulan Indonesia seperti minyak sawit atau *crude palm oil* (CPO). Pasalnya, praktik itu tidak sehat dan bakal mengganggu perekonomian Indonesia pada masa mendatang.

“Kampanye negatif serta tuduhan dari negara tujuan ekspor sawit tidak kunjung henti. Kami gerah dengan berbagai cara yang dilakukan untuk menghambat laju

ekspor komoditas unggulan Indonesia,” kata Enggar.

Sampai dengan Triwulan III tahun ini atau September 2017, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Kemendag) telah menangani 51 kasus, dengan rincian 32 kasus tuduhan dumping, subsidi, *safeguard* (DSS) atau *trade remedy* dan 5 kasus dalam tahap penyelesaian sengketa. Selain DSS, terdapat juga hambatan teknis perdagangan terkait isu kesehatan, isu lingkungan, standar, serta kebijakan perdagangan negara mitra dagang yang secara langsung maupun tidak langsung menghambat kinerja ekspor Indonesia.

Secara garis besar Kemendag mencatat hambatan teknis perdagangan banyak terjadi terhadap produk kelapa sawit Indonesia antara lain terkait isu *sustainability*, deforestasi, kesehatan dan pekerja anak. Instrumen remedies merupakan instrumen yang diperbolehkan dalam praktik perdagangan internasional serta merupakan instrumen paling mudah diterapkan untuk membendung impor dari negara lain di era liberalisasi perdagangan dan semakin banyaknya *Free Trade Agreement* antarnegara.

Indonesia-Japan Trade Relations

Enggartiasto Lukita: Now The Right Time To Collaborate



Minister of Trade Enggartiasto Lukita revealed, this time is the best momentum for Indonesian and Japanese business actors to collaborate. This is because the economies of both countries are now in good condition. “Indonesia’s political and economic stability is quite good,” Enggar said. Enggartiasto conveyed it at the Business Forum event which was a series of visits of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia in the framework of trade mission to Japan. The Business Forum held in Tokyo, Japan, on Wednesday [29/11], raised the “Fostering Trade, Investment and Economic Partnership between Indonesia and Japan”. As stated in the press release of the Ministry of Trade, the event was held thanks to the cooperation of the Ministry of Trade, ASEAN Japan Center [AJC], Jetro, and the Indonesian Embassy in Tokyo. Taking advantage of the 60-year momentum of

Indonesia-Japan diplomatic relations, according to Enggar, it is time for both countries to strengthen partnerships to take advantage of opportunities and become part of regional and global markets. “Indonesia is a country with the largest economy in Southeast Asia and one of the most dynamic member countries of G20,” said Minister of Trade in front of more than 300 business forum participants consisting of Indonesian and Japanese business actors. Furthermore, the Minister of Trade said that the world economy is growing at the highest level after the global financial crisis. Japan’s economy grew 1.5% or increased 50% over the previous year. While Indonesia is recorded at 5.2% and is one of the highest in the world. Japan, continued Enggartiasto, is one of Indonesia’s main trading partners, especially in the field of automotive and electronics. Total trade between the two countries in 2016 was recorded at USD 29 billion. Currently, Japan is the 3rd largest export destination country for Indonesia, while Indonesia is the 9th import source country for Japan. Japan has always been one of Indonesia’s biggest investors. As of September 2017, Japan is the second largest source of foreign direct investment [FDI], with a share of 13.3% of total FDI in Indonesia, or USD 1.1 billion. In line with the Minister of Trade of the Republic of Indonesia, Daisaku Hiraki, Parliamentary Vice Minister of Economy, Trade and Industry [METI] said that Indonesia is a partner country near Japan. According to him, cooperation between the two countries must be maintained and better, especially before the 60 years of diplomatic relations between the two countries.

Toward Christmas and New Year

Supply and Price of Basic Necessities are Stable

To maintain price stability and supply of basic necessities ahead of Christmas and New Year holidays the Ministry of Trade held coordination meetings with the government in the regions. During November 2017 a coordination meeting was held in 3 cities: Ambon City, Maluku Province, Pontianak, West Kalimantan Province, and Jayapura, Papua Province. Previously, in October the preliminary monitoring of the price and supply of basic commodities had been carried out in addition to those three cities, as well as in North Sulawesi, East Nusa Tenggara, North Sumatera, where the majority of the residents celebrated Christmas. In Coordination Meeting in Jayapura on Thursday [30/11], Expert Staff of the Minister of Trade of International Relations Dody Edward, revealed that the monitoring results showed that generally the price of basic necessities in six areas is relatively stable. Supply of rice, sugar, and cooking oil at National Logistical Supply Organization [Bulog] warehouse Local divre is enough to meet Christmas and New Year’s needs. In addition, the modern store is also consistently apply the sugar HET Rp12.500 / kg, simple cooking oil Rp11.000 / liter, and frozen meat Rp80.000 / kg. Some modern stores have also applied HET rice. According to Dody, based on the empirical experience, the rise in the prices of staple goods in the run up to Christmas and New Year is usually insignificant as community demand does not occur simultaneously, and occurs only in areas where the



majority of the population is celebrating Christmas. However, Dody states, the government still needs to take three anticipatory steps to face this moment. These measures are to identify supply availability and monitor prices nationally in each region; identify the readiness of agencies and business actors to avoid stock shortages or distribution disturbances; and improving the supervision of goods in circulation so that people avoid expired goods, smuggled goods, and imported goods that are not safe to be consumed or used. “The Central Government will continue to coordinate with the Local Government in charge of trade in the regions to maintain price stability and supply basic necessities. This is to ensure people can celebrate Christmas and New Year with solemn and calm,” said Dody in an official release issued by the Ministry of Trade.

Glossary

Churning
Excessive trading of an account by broker with control of the account for the purpose of generating commissions while disregarding the interests of the customer.

Circuit Breaker
A system of trading halts and price limits on equities and derivative markets designed to provide a cooling-off period during large, intraday market declines. The first known use of the term circuit breaker in this context was in the Report of the Presidential Task Force on Market Mechanisms (January 1988), which recommended that circuit breakers be adopted following the market break of October 1987.

Class [of options]
Options of the same type [i.e., either puts or calls, but not both] covering the same underlying futures contract or physical commodity [e.g., a March call at strike price 62 and a May call at strike price 58].

Clear
The process by which a clearinghouse maintains records of all trades and settles margin flow on a daily mark-to-market basis for its clearing member.

Clearing
The procedure through which the clearing house or association becomes buyer to each seller of a futures contract, and seller to each buyer, and assumes responsibility for protecting buyers and sellers from financial loss by assuring performance on each contract.

Clearing Corporation
An independent corporation that settles all trades made at the Jakarta Futures Exchange acting as a guarantor for all trades cleared by it,

reconciles all clearing member firm accounts each day to ensure that all gains have been credited and all.

Clearing Margin
Financial safeguards to ensure that clearing members (usually companies or corporations) perform on their customers’ open futures and options contracts.

Clearing Member
A member of the Clearing House or Association. All trades of a non-clearing member must be registered and eventually settled through a clearing member.



Danny Agus Setianto
Kepala Subbagian Pengawasan
Kepatuhan Pelaporan Keuangan

E-REPORTING LAPORAN KEUANGAN

Bappebti mengembangkan e-reporting untuk memantau dan mengevaluasi kepatuhan pialang perdagangan berjangka dalam hal pelaporan keuangan.

Bappebti saat ini tengah mengembangkan sistem pelaporan keuangan secara elektronik (*e-reporting*). Masalah ini dibahas dalam Konsinyering Evaluasi Pelaporan Keuangan Pialang Berjangka yang diselenggarakan Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik di Jakarta, Selasa [28/11]. Konsinyering analisa laporan keuangan ini diikuti oleh Bappebti, Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka dan pegawai Pialang Berjangka yang menangani pelaporan keuangan (*accounting*) dengan total peserta kurang lebih sebanyak 90 orang.

Kepala Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik Bappebti, Pantas Lumban Batu, mengatakan hasil dari konsinyering ini dapat memberikan masukan bagi Bappebti dan Bursa Berjangka serta Lembaga Kliring Berjangka selaku *Self Regulatory Organization* (SRO) dari Industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) dalam mengambil kebijakan dan langkah-langkah strategis yang dapat meningkatkan kualitas dari transaksi dan pelaku usaha yang terlibat di dalam industri ini. Dalam acara ini Bappebti juga mengundang pihak pengembang sistem *e-reporting*, yang diharapkan dapat memberikan solusi atas kendala yang dihadapi dalam penggunaan sistem tersebut selama ini.

Kepala Bappebti, Bachrul Chairi dalam sambutannya mengungkapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, Bappebti memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengembangan kegiatan PBK. Transaksi PBK saat ini terdiri dari 2 jenis transaksi, yaitu transaksi multilateral [di dalam Bursa Berjangka] dan transaksi bilateral [di luar Bursa Berjangka] atau yang lebih dikenal dengan transaksi Sistem Perdagangan Alternatif (SPA).

Kegiatan ini memaparkan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Bappebti, Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka khususnya mengenai pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Pialang Berjangka sampai dengan periode Triwulan III Tahun 2017. Adapun evaluasi atas pelaporan keuangan Pialang Berjangka ini bertujuan untuk mengetahui tingkat integritas keuangan para Pialang Berjangka.

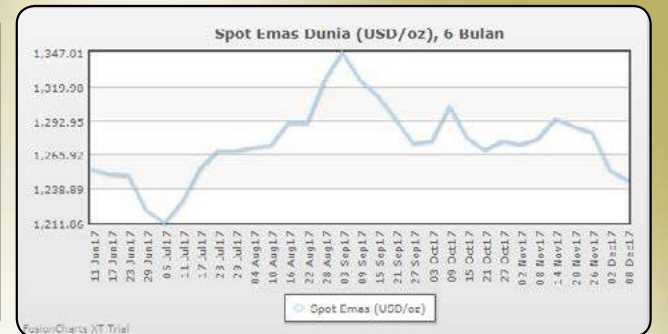
Dalam perkembangannya, *volume* transaksi PBK pada tahun 2017 [per 31 Oktober 2017] tercatat sebanyak 5.735.804 lot,

dengan rincian *volume* transaksi multilateral tercatat sebesar 1.076.503 lot dan *volume* transaksi SPA tercatat sebesar 4.659.301 lot. Dari angka tersebut terlihat transaksi SPA masih mendominasi transaksi PBK dengan kontribusi (*share*) sebesar 81,23%. Sementara jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, secara keseluruhan *volume* transaksi PBK mengalami penurunan sebesar 0,88%, dimana *volume* transaksi pada periode Januari – Oktober 2016 tercatat sebesar 5.786.499 lot.

Penurunan *volume* transaksi PBK antara tahun 2017 dengan 2016 lebih dikarenakan menurunnya *volume* transaksi multilateral sebesar 12,20%, dimana pada tahun 2017 tercatat sebesar 1.076.503 lot sementara pada tahun 2016 tercatat sebesar 1.226.088 lot. Meskipun *volume* transaksi PBK pada periode Januari – Oktober 2017 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2016, Bappebti optimis di akhir tahun 2017 *volume* transaksi PBK akan dapat meningkat.

Terkait dengan pengawasan pelaporan keuangan, saat ini Bappebti, Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka telah melakukan pengawasan laporan keuangan secara harian, bulanan, dan triwulanan melalui sistem *e-reporting*. Melalui sistem ini akan diketahui kepatuhan Pialang Berjangka dalam mematuhi aturan di bidang keuangan mulai dari penyampaian laporan keuangan sampai dengan pemenuhan persyaratan keuangan minimum [Nilai Modal Disetor, Ekuitas dan Modal Bersih Disesuaikan]. Selain itu, telah dilakukan pula pengawasan secara langsung ke perusahaan Pialang Berjangka, dimana tim pengawas akan mengecek dan memverifikasi proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh Pialang Berjangka, sehingga akan diperoleh hasil apakah Pialang Berjangka telah menyusun laporan keuangan secara benar dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

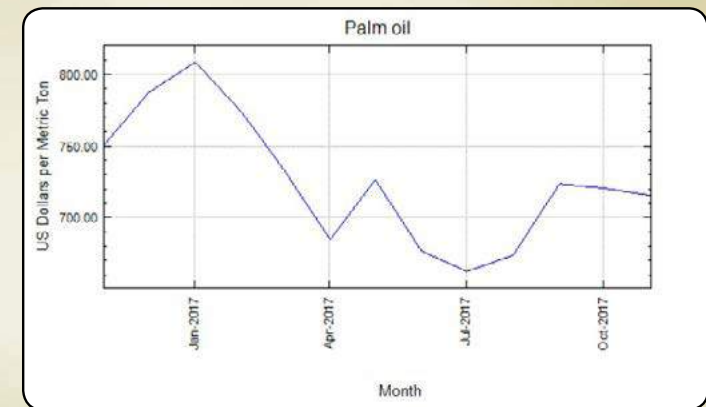
Dengan selesainya proses pengembangan sistem pelaporan keuangan elektronik (*e-reporting*) ini diharapkan dapat menjadi solusi atas masalah yang dihadapi khususnya mengenai proses pemantauan kewajiban atas penempatan dana Nasabah/margin sebesar 70% yang ditempatkan Pialang Berjangka di Lembaga Kliring Berjangka.



<http://harga-emas.org/grafik/>



Menjelang akhir tahun harga emas dunia semakin redup. Dalam sesi perdagangan Kamis [7/12] harga emas untuk pengiriman Februari 2018 di Commodity Exchange turun tipis 0,07% ke US\$ 1.265,20 per ons trol. Sehari sebelumnya harga emas ditutup US\$ 1.266,10 per ons trol dan mendekati level terendah sejak Oktober. Kenaikan suku bunga menjadi pemberat harga emas bulan ini. Dominic Schnider dari UBS Wealth Management memperkirakan harga emas terus tertekan dalam jangka pendek karena pasar menghitung ulang prospek kenaikan suku bunga Federal Reserve tahun 2018 mendatang. “Di sisi lain, ekonomi global mulai membaik, laba korporasi juga naik, dan nilai aset *safe haven* seperti emas semakin kabur,” kata Schnider. Sementara Deddy Yusuf Siregar, Analis PT Asia Tradepoint Futures mengatakan menjelang perayaan Diwali atau festival cahaya di India, permintaan emas diperkirakan akan meningkat. Selain menggerakkan harga minyak sawit mentah (CPO), festival cahaya di India itu juga berpeluang menggerakkan kebutuhan emas. “Terkait pamor *safe haven*, tiga tahun terakhir jumlah pemindahan portofolio dari aset berisiko ke aset lindung nilai sudah naik 5%-10%,” kata Deddy.



<https://www.sahamok.com/grafik-harga-komoditi/kelapa-sawit-2/>



Meskipun baru saja menyentuh level tertingginya, tetapi harga komoditas minyak sawit mentah atau *crude palm oil* (CPO) tetap berada dalam tren *bullish*. Penguatan harga diperkirakan akan berlanjut sampai akhir tahun 2017. Ada kemungkinan harga akan menyentuh level RM 3.000 per metrik ton. Agus Chandra, Analis PT Monex Investindo Futures mengatakan di akhir tahun 2017 harga CPO akan bergerak pada rentang RM 2.700 – RM 3.000. Menurutnya, selama masih disokong oleh produksi yang menurun dan permintaan yang tinggi, harga masih mungkin untuk melanjutkan penguatan. “Kalau fundamental seperti sekarang harga bisa sampai RM 3.000 per metrik ton,” ujarnya.

Sayadi

Wartawan & Pemerhati SRG

SRG, Petani Senang Kita pun Tenang



Sistem Resi Gudang (SRG) secara konsep sangat menolong petani.

Namun dalam praktiknya tidak semua berjalan mulus sesuai hitungan di atas kertas.

Ada banyak masalah yang dihadapi di lapangan, mulai dari pemahaman dasar soal SRG sampai hal-hal teknis lainnya

Menjadi petani di Indonesia selalu dirundung dengan masalah yang tak pernah selesai. Musim kemarau kekeringan, musim hujan sawahnya banjir. Musim panen raya harganya anjlok. Saat harga bagus, komoditi yang akan dijual sudah tidak ada lagi. Lingkaran ini terus melingkar bak diputar setan yang tak kenal belas kasihan. Begitulah selalu yang kita dengar dari kisah dan cerita yang diutarakan petani, terutama petani padi yang menjadi tulang punggung penyediaan pangan rakyat Indonesia.

Beruntung kita memiliki Sistem Resi Gudang atau biasa disingkat SRG yang diperkenalkan dan dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan melalui Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi). Sejak diberlakukannya SRG dengan payung hukum UU No 9 Tahun 2011 tentang Perubahan dan UU No 9 Tahun 2006 tentang SRG, pemerintah melalui Bappebti gencar membangun SRG dengan gudang dan fasilitas pendukungnya di berbagai daerah. Kini ada sekitar 120 gudang SRG yang sudah terbangun di berbagai daerah untuk menampung komoditi unggulan di daerah masing-masing, antara lain gabah, jagung, beras, kopi, karet, lada, kakao, rumput laut, garam, teh, kacang kedelai, gula pasir, gambir dan timah.

Dengan adanya sistem resi gudang, petani bisa memperoleh pinjaman modal kerja yang sangat mereka butuhkan saat memulai produksi. Seperti halnya seorang pengusaha yang mendapat proyek dan pada saat hendak memulai kerja tidak memiliki modal, maka ia akan mencari sumber pendanaan dari bank atau pihak lain. Biasanya pihak yang meminjamkan uang meminta jaminan/agunan yang bisa dijadikan pegangan jika, misalnya, terjadi gagal bayar. Demikian juga dengan SRG yang

pembiayaannya didukung oleh pihak bank. Maka bank pun meminta jaminan, dan jaminan itu adalah komoditi milik si petani yang disimpan di gudang SRG.

Diakui, sistem resi gudang secara konsep sangat menolong petani. Namun dalam praktiknya tidak semua berjalan mulus sesuai hitungan di atas kertas. Ada banyak masalah yang dihadapi di lapangan, mulai dari pemahaman dasar soal SRG sampai hal-hal yang sangat teknis lainnya. Tak heran jika kita menemui juga terdapat gudang SRG yang tidak jalan atau terlantar. Akan tetapi semangat Bappebti untuk menjalankan konsep SRG patut diacungi jempol. Sebab Bappebti yakin bahwa SRG akan sangat menolong para petani dan contoh SRG yang sukses juga sudah diperlihatkan di beberapa negara lain, seperti di negara-negara Eropa. Disadari kondisi petani di Indonesia berbeda dengan negara-negara lain yang sudah menjalankan SRG lebih dahulu. Di sini para petani hanya memiliki lahan sempit. Penelitian yang dilakukan oleh Institut Pengembangan Ekonomi dan Keuangan [Indef] yang dirilis bulan Mei 2017 mengungkapkan kepemilikan lahan petani di Indonesia rata-rata hanya 0,8 hektar atau 8.000 meter persegi saja. Bandingkan dengan petani Thailand yang memiliki lahan 3,2 hektar, atau



Filipina 2 hektar. Dengan penguasaan teknologi yang juga di bawah petani negara-negara maju, lahan milik petani Indonesia juga masih kalah, misalnya dibandingkan dengan Jepang yang rata-rata petaninya menguasai 1,57 hektar dan Korea Selatan 1,46 hektar. Indef memperkirakan penyusutan penguasaan lahan pertanian itu masih terus terjadi seiring berjalannya waktu.

Dengan pola kepemilikan lahan yang sempit seperti itu pelaksanaan SRG juga dimodifikasi yakni dengan cara para petani mengumpulkan hasil panennya di dalam kelompok tani masing-masing. Maksudnya, dengan cara berkelompok itu SRG bisa dilaksanakan secara efisien. Bayangkan jika setiap petani yang hasil panennya hanya 1 ton kemudian mereka mengajukan pinjaman melalui SRG, proses administrasinya menjadi "ribet". Karena pengajuan 1 ton dengan 100 ton misalnya, secara administrasi penangannya sama repotnya.

Terobosan Pelatihan

Untuk meningkatkan mutu SRG yang dilaksanakan diperlukan tenaga-tenaga terampil yang menguasai permasalahan. Yang menarik adalah Bappebti melakukan terobosan dengan melakukan pelatihan secara intensif untuk para calon manajer maupun tenaga pendukung SRG. Jika biasanya pelatihan hanya berlangsung satu dua hari, maka pelatihan SRG yang

dilakukan oleh Bappebti berlangsung selama 2 minggu. Para peserta tidak hanya dibekali pengetahuan teori tapi juga praktik di lapangan serta simulasi pelaksanaan SRG sebagaimana mereka akan menemui pada saat SRG berjalan. Tentu pengetahuan dan keterampilan mereka harus diuji di lapangan nantinya. Tapi pembekalan yang dilakukan secara komprehensif seperti itu semestinya bisa memberi semangat dan keyakinan diri bahwa mereka bisa sukses menjalankan SRG di daerahnya masing-masing. Dalam tahun 2017 ini pelatihan intensif ini bukan hanya untuk para pengelola gudang, tetapi juga diberikan juga kepada petugas uji mutu garam, komoditi yang juga sekarang sudah dimasukkan dalam SRG.

Pelatihan demi pelatihan dipastikan akan berlangsung jika anggaran mencukupi. Akan tetapi kesuksesan SRG tidak semata peran Bappebti. Kerjasama yang baik dengan pihak perbankan, terutama dengan petani, bahkan dengan para tengkulak yang selama ini menjadi musuh petani pun harus terus dibina dengan baik. Mengapa dengan tengkulak juga harus kerjasama? Ya, karena mereka perlu dirangkul agar tidak menjadi musuh SRG, tapi sebaliknya mereka menjadi mitra yang turut membangun SRG. Sebab bagi para tengkulak itu yang penting adalah margin atau keuntungan, tak penting apakah

itu melalui beli langsung dari petani atau melalui SRG. Hitung-hitungan gampang, daripada penghasilan hilang sama sekali akibat adanya SRG, maka tengkulak yang cerdas akan memilih merapat ke SRG.

Mem-Buzz SRG

Sepuluh tahun lebih SRG berjalan pada level masyarakat belum terdengar dengungannya. Bukan salah siapa-siapa. Memang perlu kerja lebih keras lagi agar SRG benar-benar menjadi sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan menjadi bagian aktivitas para petani dan stakeholder lainnya. Setelah pelatihan yang intensif, sepatutnya Bappebti juga mempertimbangkan pemanfaatan media digital secara masif. Pada jaman-now dimana semua orang menggunakan smartphone isu tentang SRG mesti juga didengungkan alias di-buzz ke semua kalangan. Para pengambil keputusan yang ada di Senayan [anggota DPR] perlu mendorong dan mempromosikan peningkatan kesejahteraan petani melalui SRG. Media sosial seperti facebook, WA, Twitter, Instagram bisa dimanfaatkan untuk promosi Sistem Resi Gudang. Jika pada akhirnya sistem ini berhasil mengangkat ekonomi petani maka semua orang pun bisa turut merasakan kebahagiaan para petani. Percayalah, kalau petani senang, kita semua akan tenang.

Deni Kurnia
Petani Peserta SRG

Petani Benar-benar Rasakan Manfaat Sistem Resi Gudang

Awalnya Deni menjaminkan gabah milik pribadinya lebih dahulu masuk ke dalam gudang SRG. Setelah dia sukses barulah ia mengajak petani lainnya ikut merasakan manfaat SRG

Tahun 2016 menjadi momen penting bagi petani di wilayah Cianjur, Jawa Barat. Saat itu Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, menyatakan Sistem Resi Gudang (SRG) yang ada di daerah ini dinilai sebagai salah satu SRG terbaik di Indonesia. Pernyataan ini ditujukan kepada Koperasi Niaga Mukti sebagai pengelola SRG, sekaligus juga dirasakan sebagai pujian untuk para petani di wilayah Cianjur.

Salah seorang petani yang merasakan bangga atas prestasi ini adalah Deni Kurnia. Deni aktif dalam program SRG ini sekitar akhir tahun 2011.

Ia tertarik dengan keberadaan SRG yang merupakan instrumen perdagangan maupun keuangan yang memungkinkan komoditi yang disimpan dalam gudang memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan tanpa diperlukan jaminan lainnya.

"Saat itu, Pak Nana Sukatna selaku pengurus Koperasi Niaga Mukti yang memegang Resi Gudang di Warung Kondang menawarkan solusi apabila harga anjlok ketika panen raya. Dengan cara menyimpan gabah kering di tempat mereka dan kita bisa menjaminkan surat resinya ke Bank Jabar untuk biaya pengolahan sawah lagi," jelas Deni.

Pada awalnya lelaki 34 tahun ini hanya mencoba dulu secara pribadi dan ia belum berani memberitahu anggota Kelompok tani yang lain. Karena biasanya kalau di kampung kalau belum ada yang mencoba terus ditawari suka pada tidak mau.

Deni mencobanya dengan cara meresigudang-kan hasil panennya atas nama pribadi dulu, berupa padi jenis IR sekitar 10 ton jumlahnya. Setelah

sendirian merasakan manfaatnya barulah ia mengajak para petani yang lain untuk menyimpan gabah atau beras di gudang SRG Warung Kondang pada saat harga anjlok yang biasanya terjadi pada saat panen raya.

Dengan Jadi, di saat tidak punya biaya bisa mengolah sawah lagi.

Ada lima orang yang diajaknya bergabung. Sebelumnya kepada mereka dijelaskan terlebih dulu tentang Sistem Resi Gudang. Karena tidak semua anggota lahannya luas dan hasil panennya banyak, maka Deni mengumpulkan hasil panen para petani menjadi satu sehingga yang terdaftar ke resi gudang hanya satu orang. Ini dimaksudkan untuk menyederhanakan persoalan administrasi dan memenuhi kuota minimal agar bisa masuk dalam Sistem Resi Gudang. Sementara untuk catatan rinciannya dan pembagian uangnya, diurus oleh Kelompok Tani mereka.

"Alhamdulillah mereka setuju. Karena petani *mah* rata-rata nggak pengen ribet sama urusan administrasi. Istilahnya,



saya punya gabah segini cukuplah untuk di-resigudang-kan bisa," jelas suami Yane Yulliane ini memberi gambaran kondisi para petani di daerahnya.

Sekarang sudah ada 20 orang anggota poktan yang suka meresigudang-kan. Menurut ayah dua anak, yakni Muhammad Azka Arroyan dan Asma Sabine Ayasofia, di kelompok taninya juga ada yang memiliki penggilingan padi kecil-kecilan, tetapi mereka tidak punya gudang penyimpanan. Kepada mereka Deni juga merangkul dan mengajaknya menyimpan beras atau gabah di gudang SRG.

Sejak ikut SRG sampai sekarang Deni merasakan manfaat positif sistem ini. Menurutnya, selain aspek pembiayaan, para petani juga menjadi mudah mendapatkan bantuan alat-alat pertanian seperti traktor, mesin pompa air, dan benih. Jika dibandingkan sebelum dan sesudah masuk SRG tentu saja baginya sangat berbeda keadaannya. Kalau sebelum masuk resi gudang, sangat susah mau menaikkan harga ketika panen raya. Kalau cuaca sedang bagus mungkin bisa dikeringkan dan disimpan sendiri. Tapi, kalau cuaca buruk kan diolah sendiri juga susah.

Dengan masuk resi gudang harga terjaga.

Setelah ada resi gudang kalau ketemu kondisi seperti itu ia tinggal menyimpan saja di resi gudang. Kalau pun cuaca sedang jelek bisa menggunakan oven yang tersedia di gudang SRG. Jadi, kualitas standar resi gudangnya tetap terjaga.

Kalau bicara faktor uang memang ada peningkatan. Tapi, kebutuhan juga sama-sama meningkat. Contohnya tahun 2011 biaya untuk 1 hektar sawah kurang lebih Rp10 juta dari mulai tanam sampai panen dengan harga gabah antara Rp3.500 hingga 3.700 per kg. Sekarang biayanya kurang lebih Rp11,5 juta s/d 12 juta per hektar, dengan harga gabah berkisar 4.000 hingga 4.500 per kg.

Deni menyatakan untuk lebih bisa meningkat lagi produksi para petani perlu diantaranya benih dan pupuk yang bagus, karena banyak benih yang beredar kurang bagus dan juga pupuk palsu. Demikian juga dengan alat pertanian yang sesuai dengan daerah pertaniannya, karena banyak mesin-mesin pertanian yang mubazir karena tidak cocok dengan daerah pertaniannya.

Contohnya *Combine Harvester Medium* untuk lahan sawah yang kecil-kecil. "Memang, tenaga manusia untuk mengolah sawah sudah mulai berkurang, tapi dengan mesin-mesin atau alat-alat yang tidak sesuai juga malah mubazir jadinya," ujarnya.

Deni berharap pengelola gudang SRG di Cianjur bisa menambah alat oven padi. Sebab dengan makin cepat proses pengolahan dari sawah ke gudang makan akan semakin baik kualitas berasnya. Oven tersebut sangat besar manfaatnya, terutama pada saat musim hujan karena proses pengeringan di lantai atau pelataran pasti makan waktu lebih lama.

Lantas, apa kebanggaannya menjadi petani, terutama sebagai petani Cianjur yang berasnya sudah terkenal enak itu? "Saya sendiri selama kita masih makan nasi Insha Allah masih siap jadi petani. Dan, beras Cianjur meskipun untuk tampilan biasa-biasa saja, tapi soal rasa memang saya belum menemukan yang lebih enak di lidah, selain nasi dari beras yang padinya ditanam di Cianjur," kilah penggemar naik sepeda ke gunung dan bulutangkis mengakhiri percakapan.



Sukseskan MER (Mutual Evaluation Review)



#KOMIKITA

0811-11-9-901
SMS CENTER
BAPPEBTI

Layanan SMS Center BAPPEBTI

Jika Anda mempunyai informasi atau pertanyaan mengenai kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditi (PLK) sesuai dengan tupoksi Bappebti Kementerian Perdagangan dapat disampaikan melalui SMS 0811-1109-901. Dengan format NAMA (spasi) DOMISILI (spasi) ALAMAT EMAIL (spasi) PESAN *SMS dikenakan biaya reguler (tergantung dari masing-masing provider telepon)

Siswadi (Sukabumi, Jawa Barat) 0897-8085XXXX

Pertanyaan:

Sekarang ini zaman serba online, banyak sekali peluang investasi perdagangan komoditi yang ditawarkan secara online. Akan tetapi seringkali juga terjadi penipuan, dimana setelah beberapa kali perusahaan memberikan jasa keuntungan atau margin dari investasi yang ditanamkan, tiba-tiba mereka menghilang. Website-nya tidak aktif, begitu juga nomor telponnya tidak bisa dihubungi. Saya minta kepada Bappebti untuk melakukan tindakan tegas terhadap perusahaan penipu semacam itu. Kalau tidak masyarakat akan banyak yang menjadi korban.

Jawab:

Terima kasih atas saran Pak Siswadi. Kami dari Bappebti terus melakukan pemantauan terhadap perusahaan-perusahaan perdagangan berjangka komoditi, termasuk yang menawarkan investasi di perdagangan berjangka. Untuk diketahui kami sudah cukup banyak menutup website perusahaan yang terbukti abal-abal dan melakukan penipuan. Dalam melakukan tindakan kami berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan juga OJK serta PPATK. Kami mengimbau agar masyarakat berhati-hati dan jangan sungkan menghubungi kami untuk memperoleh informasi yang diperlukan.

INDONESIA HEBAT TANPA PENCUCIAN UANG



► Kesenjangan Ekonomi, Sulitnya Mencari Pekerjaan, Bisnis yang rentan, Tingginya Angka Kejahatan bagian Masalah Bangsa yang Harus Diatasi



► Korupsi, Penggelapan Pajak, Penyalahgunaan Narkotika, Terorisme, Pencucian Uang, dan Kejahatan Ekonomi Lainnya Menghasilkan Dampak Buruk Bagi Negara Kita

► Pelaku Kejahatan Tidak Berhenti pada saat Kejahatan dilakukan dan Hasil Kejahatan Berhasil Diperoleh. Pelaku Kejahatan Biasanya Juga Menyembunyikan atau menyamarkan uang / harta hasil kejahatan sehingga seolah-olah tampak sah. Perbuatan tersebut adalah **PENCUCIAN UANG**



Pelaku Pencucian Uang berniat untuk menghindari penyelidikan aparat hukum, meningkatkan keuntungan dan menikmati harta kekayaan hasil kejahatan dengan aman

► Dalam melakukan aksinya, pelaku pencucian uang akan menempatkan hasil kejahatan kedalam berbagai transaksi keuangan, memindahkan dan memperpanjang rangkaian transaksi dan pada akhirnya, setelah dirasa aman, pelaku akan mengambil kembali uang/harta itu untuk dinikmati.

**PENCUCIAN
UANG
BERDAMPAK
PADA:**



Meningkatnya angka kriminalitas



Sektor swasta yang sah sulit berkembang



Integritas sistem keuangan terganggu



Hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi

KALAU BERSIH KENAPA HARUS RISIH

Keren SRG Sejahterakan Petani



Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)
www.bappebti.go.id